

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anjas Saputra & Andreas Andoyono. Pengantar Konsep dan Teori Smart Government. CV Adanu Abimata, 2023.
- Abdul Majid. Penelitian Data Kualitatif. Penerbit Aksara Timur, Makassar, 2017.
- Abdurrachman. Dasar-Dasar Public Relations. PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Agus Dwiyanto, Administrasi Publik Desentralisasi , kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara , Gajahmada University Ppress dan LAN , 2018
- Antonius Setyadi. Kewirausahaan Bisnis di Era Digital.
- Andy Fefta Wijaya ,Magement Publik Teori dan Praktik,
- Amirudin & Zainal Asikin – Pengantar Metode Penelitian Hukum (RajaGrafindo Persada, 2020
- Assihiddiqie , Teori Hans kelsen tentang Hukum , 2006
- Azhar , Sistem Hukum Indonesia ,Universitas Sriwijaya , 2017
- Budi Untung. Hukum dan Etika Bisnis. Andi, Yogyakarta.

- Basri Badi. Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah. Tahta Media Grup, Klaten, 2022.
- Badan pemeriksaan keuangan, Pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah , Prenadamedia Group , 2020
- Pilar pembangunan Hukum dan tata kelola ,kementerian perencanaan pembangunan nasional / Badan Perencanaan Pembangunan ,2017
- Bernad Sidharta , struktur ilmu hukum , mandar maju ,2009
- David Osborne & Ted Gaebler. Reinventing Government. 1996.
- Dian Puji N. Simatupang. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.
- Dimas Dwi Condro, penyusunan Rencana Bisnis dan anggaran Untuk Badan layanan Umum daerah, Syncore Indonesia ,2020
- Ewan Ferlie ,New Public management in Action, 1996
- Fernando manulang , legisme , Legalitas dan Kepastian Hukum, Prenada media Group , 2009
- Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009

- Hamdan Firmansyah. Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru. Media Sains Indonesia, 2020.
- Heo Huijbers. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Indra Surya. Penerapan Good Corporate Governance. Kencana, 2008.
- I Made Pasek Diantha. Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Kencana, Jakarta, 2017.
- James M. Higin. The Management Challenge. 1995.
- Johny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris.
- Kao. Entrepreneurship Creativity and Organization. Prentice Hall, 1989.
- Kolega Nindyo Pramono , Sumbangan pemikiran Hukum Bisnis Untuk pembangunan Indonesia , 2024 , Penerbit Divya media Pustaka
- Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. P.T. Alumni, 2002.
- Moch Afif , pengantar Ilmu Hukum , Yoga Pratama 2014
- Neni Sri Imaniyati. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika, 2018.

- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Paiman Napitupulu. Pelayanan Publik & Customer Satisfaction. PT Alumni, Bandung, 2012.
- Philip Kotler. Pemasaran Sektor Publik. Indeks.
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keempat, 1990.
- Andi Purnawati Dkk, Hukum dan pwmbangunan, Eureka Media Aksara, Gramedia 2021
- Rosyda. Kewirausahaan. Gramedia.
- R Rindu Garvera Dkk, pelayanan sektor Publik – New Public Management , Rumah Cemerlang ,2024
- Sofyan Hadi , kepastian Hukum , Fakultas Hukum !& Agustus , 2023
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Alfabeta, 2012.

- Slamet , imam Bani < achmad Diny Hidayatullah, Wealth bManagement ; Konsep dan Model pengemebangan perguruan Tinggi Badan layanan umum, indra Piublisher , 2022
- Teguh Satya Bhakti. Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara. Alumni, Bandung, 2022.
- Ronny Hantijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. CV Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sahat Maruli Situmeang , Sistem Hukum IUndonesia , Logoz,2020

JURNAL

- Penerapan New Public management (NPM) Di Indonesia (reformasi Birokrasi , Desentralisasi , Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan pelayanan Publik) , Anita Agus Puspawati, Dosen FISIP Universitas Lampung .
- Analisis Yuridis pelayanan Publik Yang Baik Sewbagaimana mewujudkan Good Governance dalam Konsep Welfare State – Dyah Adriantini Sinta Dewi, Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Magelang
- Badan layanan Umum sebuah Inovasi kelembagaan Pemerintahan – Lisa Novianti , Universitas Andalas, 2023

- Penerapan New Public management di Indonesia -Ani Agus Puspawati , Dosen Fisip Universitas lampung
- Eksistensi badan layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik – henny Juliani , Universitas Diponegoro
- Teori Hukum pembangunan Prof Dr.Mochtar Kusumatmadja ,SH.,LLM, kajian Deskriptif, Lilik Mulyadi , Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERATURAN

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara .
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan .
- Undang Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum

- Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.05/2009 : Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.05/2009 : Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.05/2009 : Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.05/2008 : Tata cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008: Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

- Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Permenkeu No.10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Renumerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan No. 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan no. 171/PMK.05/2007: Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Mencabut Permenkeu no. 59/PMK.06/2005.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layana Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006 : Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.